

**KINERJA PENYULUH BP3K MENGGALA
SEBAGAI MODEL *CENTER OF EXCELLENCE* (COE)
DI KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG**

(Skripsi)

Oleh

INDAH LISTIYANTI



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015**

ABSTRACT

Extension Workers Performance of BP3K Menggala as Center of Excellence (CoE) Model in Menggala District Tulang Bawang Regency

By

Indah Listiyanti

The successful development of the agricultural sector can not be separated from the collaboration between governments, related agencies and farming communities, by conducting outreach activities that are expected to help overcome the various problems faced by farmers in farming. This study aims to determine: extension worker's performance of BP3K Menggala as Center of Excellence (CoE) Model and factors related to the extension workers performance of BP3K Menggala as Center of Excellence (CoE) Model in Menggala District Tulang Bawang Regency. This study was conducted in eight villages BP3K target area in October 2013. The number of samples are 8 extension workers and 97 farmers. Methods of data analysis used in this research is quantitative descriptive analysis and Spearman Rank analysis. The results showed that extension workers performance in BP3K Menggala included in the classification of low and factors associated significantly affect the extension workers performance in BP3K Menggala were age extension, formal education counselor, extension workers household income, long served as an extension workers and number assisted farmers, while extension workers income, distance of extension workers residence with a place on duty, working facilities, quality of extension workers as a human resource and the incentives are not related significantly.

Keywords: *BP3K, CoE, Extension, Farmers and Performance.*

ABSTRAK

KINERJA PENYULUH BP3K MENGGALA SEBAGAI MODEL *CENTER OF EXCELLENCE* (CoE) DI KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

Indah Listiyanti

Keberhasilan pengembangan sektor pertanian tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat petani, dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani dalam berusahatani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai BP3K Model *Center of Excellence* (CoE) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilaksanakan di delapan desa wilayah binaan BP3K pada bulan Oktober 2013. Jumlah sampel penelitian sebanyak 8 orang penyuluh dan 97 orang petani. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis *Rank Spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh di BP3K Menggala termasuk dalam klasifikasi rendah dan faktor-faktor yang berhubungan nyata terhadap kinerja penyuluh di BP3K Menggala yaitu umur penyuluh, pendidikan formal penyuluh, pendapatan rumah tangga penyuluh, lama bertugas sebagai penyuluh dan jumlah petani binaan, sedangkan pendapatan penyuluh, jarak tempat tinggal penyuluh dengan tempat bertugas, fasilitas kerja, peningkatan kualitas SDM dan insentif yang diterima tidak berhubungan secara nyata.

Kata Kunci : BP3K, CoE, Penyuluh, Petani dan Kinerja.

**KINERJA PENYULUH BP3K MENGGALA
SEBAGAI MODEL *CENTER OF EXCELLENCE* (COE)
DI KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

Indah Listiyanti

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN**

pada

**Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015**

**Judul Skripsi : KINERJA PENYULUH BP3K MENGGALA
SEBAGAI MODEL CENTER OF
EXCELLENCE (COE) DI KECAMATAN
MENGGALA KABUPATEN TULANG
BAWANG**

Nama Mahasiswa : Indah Istiyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 0854023018

Jurusan : Agribisnis

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian



Dr. Ir. Sumaryo GS, M.Si.
NIP 19640327 199003 1 004

Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc.
NIP 19610914 198503 2 001

2. Ketua Jurusan

Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S.
NIP 19630203 198902 2 001

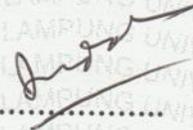
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

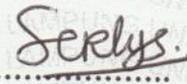
Ketua : Dr. Ir. Sumaryo GS, M.Si.



Sekretaris : Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc.



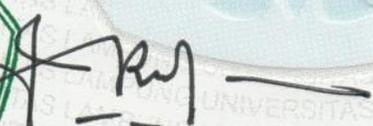
**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Serly Silviyanti S, S.P., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP 19611020 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Desember 2015

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pandan Surat pada tanggal 07 Oktober 1990 dari pasangan bapak Suyitno dan ibu Hartati. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Pandansurat pada tahun 2002, tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP Negeri 2 Sukoharjo pada tahun 2005, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Pringsewu 2008. Penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis pada tahun 2008.

Saat perkuliahan, diwajibkan melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat dan dunia kerja seperti: melaksanakan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada 21-24 Januari 2009; melaksanakan Praktik Umum di PT Sang Hyang Seri pada tahun 2011 dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi sebagai anggota Bidang Organisasi dan Kaderisasi Unit Kegiatan Pembinaan Kerohanian Mahasiswa Hindu Unila (UKM HINDU) Tahun 2008-2009, anggota Bidang Kewirausahaan Unit Kegiatan Pembinaan Kerohanian Mahasiswa Hindu Unila (UKM HINDU) Tahun 2009-2010 dan di tahun yang sama penulis aktif sebagai Reporter Magang di Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) TEKNOKRA Unila.

Tahun 2010-2011 penulis menjadi Bendahara Umum Unit Kegiatan Pembinaan Kerohanian Mahasiswa Hindu Unila (UKM HINDU). Penulis juga aktif di organisasi mahasiswa eksternal kampus yakni sebagai anggota Bidang Organisasi dan Kaderisasi Pimpinan Cabang Bandar Lampung Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (PC KMHDI Bandar Lampung) tahun 2009-2010, menjadi anggota Bidang Organisasi dan Kaderisasi Pimpinan Daerah Lampung Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (PD KMHDI Lampung).

SANWACANA

Om Swastyastu, Om Awignamastu Namō Sidham, Astungkara penulis haturkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah melimpahkan waranugraha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi dan saran-saran yang membangun yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih tersebut disampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Sumaryo GS, M.Si., selaku pembimbing pertama atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi serta nasihat-nasihat kepada penulis selama penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi serta nasihat-nasihatnya, terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Serly Silviyanti S, S.P., M.Si., selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran, kritik dan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini.

4. Indah Listiana, S.P., M.Si., selaku pembimbing kedua sebelum pergi melanjutkan pendidikan, terimakasih atas saran, motivasi serta nasihat-nasihat yang diberikan.
5. Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
6. Ir. Suarno Sadar, selaku Pembimbing Akademik (PA) atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
7. Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P., selaku Ketua Jurusan Agribisnis yang telah memberikan nasihat dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di Jurusan Agribisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung ini.
9. Staf Administrasi dan Karyawan Jurusan Agribisnis (Mba Ayi, Mba Fitri, Mba Iin, Mas Bukhori, Mas Kardi, Mas Boim) terimakasih atas bantuannya.
10. Orangtuaku terkasih dan terhebat bapak Suyitno dan ibu Hartati, yang tidak pernah lelah berjuang demi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Terimakasih yang tak terbatas atas limpahan kasih sayang serta kesabarannya dalam menanti kesuksesanku.
11. Kakanda-kakandaku tersayang, Wijiono, S.E., Winarno, S.P., dan Yudi setiawan, serta iparku Made Suarti, S.P., Sri Maryanti dan Sofa Safrida, atas kasih sayang yang tulus, dukungan baik materil maupun moril yang diberikan selama ini.
12. Seluruh penyuluh BP3K Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta para petani di wilayah kerja BP3K Menggala yang menjadi responden penulis atas bantuan yang diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.

13. Keponakan-keponakanku Chanda Nararya Maharani, Calista Prema Maheswari, Citra Dewani Nareswari, Puteri Ayu Wieke Windana, Shiva Puja Dharmajay Kusuma dan Ni Ajeng Anggi Satyavati, atas suntikan semangat yang berasal dari kelucuan serta kepolosan tingkah laku kalian.
14. Sahabat-sahabat teristimewaku Mesianna Marito Ambarita S.P., Agustina Irene Pasaribu S.P., Nurul Hidayah S.Kom., Ayu Sekar Sari S.P., Nasyir Husain S.Pi., Silvi Arif Purbandari S.Kep., Inggus Catur Prasetyo S.Pd, Wayan Feri Sanjaya S.T., serta Dwi Marwanto S.Pd.H., atas dukungan, semangat, kebersamaan serta kesediaannya bertukar ilmu dan pendapat selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan para Pecinta Ruang Baca, Rani Oni, Umi M, Agnes, Linanda, Rissa Y, Andan, Taufik, Arif R, Arif N, Guntur, Rian Arya, Ando, Vitho, Ari Budi atas kebersamaannya yang luar biasa.
16. Teman-teman seperjuangan selama penelitian di enam kabupaten, Yessica Veronika Simanungkalit S.P., Edlin Sarasmita S.P., Aris Ardiansyah S.P., Willy Akbar Winardi S.P., Fitriansyah Bakti Praja S.P.
17. Kawan-kawan organisasi UKMH UNILA, TEKNOKRA, KMHDI dan Peradah Indonesia atas semangat, kebersamaan serta kesediaannya bertukar pengalaman dalam berorganisasi.
18. Teman-teman Agribisnis 2008 Yunika, Lutfi, Titik, Rosika, Ni Wy Hermayanti, Sri AM, Sabastina, Sri W, Rahayuningsih, Rissa O, Yemima, Mitha, Dila, Nuni, Sasi, Kartika, Azzahri, Bondan, Agung, Ribut dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

19. Adinda-adinda terhebat Ni Wayan Putriasih S.P., dan Maria Cristina Pasaribu atas bantuan dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini. Atu dan kiyai '05, '06, '07 dan adinda '09, '10, '11, '12 atas kerjasamanya selama ini.
20. Almamater tercinta dan semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan terbaik atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. *Om santih, santih, santih Om*

Bandar Lampung, Desember 2015

Penulis,

Indah Listiyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	10
1.3 Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	12
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Penyuluhan Pertanian.....	12
2.1.2 Teori Kinerja.....	18
2.1.3 Kelembagaan Penyuluhan.....	28
2.1.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.2. Kerangka Pemikiran.....	36
2.3. Hipotesis.....	39
III. METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran <i>Variabel</i>	40
3.1.1. <i>Variabel Independen (X)</i>	40
3.1.2. <i>Variabel Dependen (Y)</i>	45
3.2. Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian dan Responden.....	52
3.3. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	55
3.4. Metode Analisis data dan Pengujian Hipotesis.....	55
IV. GAMBARAN UMUM.....	58
4.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	58

4.2.Kondisi, Topografi, Tanah dan Iklim.	60
4.3.Keadaan Penduduk.	60
4.4.Sarana dan Prasarana.	61
4.5.Gambaran Umum BP3K Menggala.	62
4.5.1. Kelembagaan Penyuluh.....	63
4.5.2. Kelembagaan Petani.....	63
 V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 65
5.1. Identitas Responden.....	65
5.2.Deskripsi <i>variabel-variabel</i> yang Berhubungan dengan Kinerja Penyuluh BP3K Menggala sebagai Model <i>Center of</i> <i>Excellence</i> (CoE)	65
5.2.1. Umur Penyuluh (X ₁)... ..	65
5.2.2. Tingkat Pendidikan Formal Penyuluh (X ₂)	66
5.2.3. Pendapatan Penyuluh (X ₃).....	67
5.2.4. Pendapatan Rumah Tangga Penyuluh (X ₄).....	68
5.2.5. Lama Bertugas sebagai Penyuluh (X ₅).....	69
5.2.6. Jarak Tempat Tinggal dengan Tempat Bertugas (X ₆)	70
5.2.7. Fasilitas Kerja (X ₇).....	71
5.2.8. Peningkatan Kualitas SDM (X ₈)... ..	73
5.2.9. Jumlah Petani Binaan (X ₉)... ..	74
5.2.10. Insentif Yang Diterima (X ₁₀)... ..	75
5.3.Deskripsi Kinerja Penyuluh Pertanian.....	76
5.3.1. Tersusunnya Program Penyuluhan Pertaian ditingkat BPP/Kecamatan sesuai dengan Kebutuhan Petani.....	76
5.3.2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.....	79
5.3.3. Tersusunnya Peta Wilayah Komoditas untuk Pengembangan Teknologi Spesifikasi Lokasi.....	82
5.3.4. Tersebaranya Informasi Teknologi Pertanian Secara Merata.....	84
5.3.5. Tumbuh Kembangnya Keberdayaan dan Kemandirian Petani.....	86
5.3.6. Terwujudnya Kemitraan Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Saling menguntungkan.....	89
5.3.7. Terwujudnya Akses Petani ke Lembaga Keuangan dan Penyedia Sarana Produksi.....	91
5.3.8. Meningkatnya Produktivitas Agribisnis Komoditi Unggulan di Masing-masing Wilayah Kerja.....	93
5.3.9. Meningkatnya Pendapatan Petani di Masing-masing wilayah Kerja.....	95
5.3.10. Meningkatnya Penerapan <i>Cyber Extension</i> dalam Kegiatan Penyuluhan.....	98
5.4.Pengujian Hipotesis.	104
5.4.1. Hubungan antara umur penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala... ..	106
5.4.2. Hubungan antara pendidikan formal penyuluh dengan kinerja	

penyuluh di BP3K Menggala... ..	107
5.4.3. Hubungan antara pendapatan penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala... ..	108
5.4.4. Hubungan antarapendapatan rumah tangga penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala	109
5.4.5. Hubungan antara lama bertugas sebagai penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala... ..	110
5.4.6. Hubungan antara jarak tempat tinggal penyuluh ke tempat bertugas dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala.....	111
5.4.7. Hubungan antara fasilitas kerja dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala.....	113
5.4.8. Hubungan antara peningkatan kualitas SDM penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala... ..	113
5.4.9. Hubungan antara jumlah petani binaan penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala... ..	114
5.4.10. Hubungan antara insentif yang diterima penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala... ..	115
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.	116
6.1 Kesimpulan.....	116
6.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, tahun 2011.....	2
2. Daftar BP3K Model CoE Provinsi Lampung.....	8
3. <i>Variabel</i> , definisi operasional, indikator pengukuran dan skor/ukuran kinerja penyuluh.....	43
4. <i>Variabel</i> , definisi operasional, indikator pengukuran, dan skor/ukuran kinerja penyuluh.....	50
5. Jumlah petani responden.....	54
6. Jumlah sampel penelitian (Petani dan Penyuluh).....	55
7. Keadaan Penduduk Berdasarkan Golongan.....	61
8. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Menggala tahun 2014.....	62
9. Nama Penyuluh di BP3K Menggala.....	63
10. Jumlah Kelompok Tani di Wilayah Binaan BP3K Menggala.....	64
11. Keadaan responden berdasarkan kelompok umur.....	66
12. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan formal.....	67
13. Keadaan responden berdasarkan pendapatan dalam rupiah.....	68
14. Keadaan responden berdasarkan pendapatan rumah tangga dalam rupiah.....	69
15. Keadaan responden berdasarkan lama bertugas sebagai penyuluh.....	70

16. Keadaan responden berdasarkan jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas.....	71
17. Sebaran jumlah fasilitas yang dimiliki BP3K Menggala.....	72
18. Sebaran skor peningkatan kualitas SDM	73
19. Jumlah petani binaan	75
20. Insentif yang diterima penyuluh.....	76
21. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam menyusun program penyuluhan pertanian.....	78
22. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan penyuluh pertanian.....	80
23. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam menyusun peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi..	83
24. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam menyebarkan informasi teknologi pertanian secara merata.....	85
25. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam menumbuh kembangkan keberdayaan dan kemandirian petani.....	87
26. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam mewujudkan terjalinnya kemitraan usaha antara pelaku utama atau petani dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan.....	90
27. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam mewujudkan akses petani dengan lembaga keuangan dan penyedia sarana produksi.....	92
28. Klasifikasi tingkat kinerja penyuluh dalam meningkatkan produktivitas agribisnis komoditi unggulan di masing-masing wilayah kerja.....	94
29. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam meningkatkan pendapatan petani di masing-masing wilayah kerja.....	96
30. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam meningkatkan penerapan <i>Cyber Extention</i> dalam kegiatan penyuluhan menurut persepsi penyuluh.....	99
31. Klasifikasi dan sebaran nilai modus tingkat kinerja penyuluh dalam meningkatkan penerapan <i>Cyber Extention</i> dalam kegiatan penyuluhan menurut persepsi petani.....	100

32. Rekapitulasi tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala menurut persepsi penyuluh dan persepsi petani.....	102
33. Tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala secara keseluruhan.....	103
34. Hasil analisis korelasi <i>Rank Spearman</i> antara <i>variabel X</i> dan <i>variable Y</i>	105
35. Identitas responden petani binaan penyuluh di BP3K Menggala.....	123
36. Identitas responden penyuluh BP3K Menggala.....	128
37. Skor tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala menurut Penyuluh.....	129
38. Skor tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala menurut petani.....	130
39. Skor tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala menurut penyuluh setelah MSI.....	133
40. Skor tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala menurut petani setelah MSI.....	134
41. Rekapitulasi <i>variabel X</i> dan <i>variabel Y</i>	137
42. Hasil Korelasi <i>variabel X</i> dan <i>variabel Y</i>	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Efektivitas Kinerja Penyuluh BP3K Menggala sebagai Model <i>Center of Excellence</i> (CoE).....	38

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mayoritas penduduknya. Hal ini karena Indonesia memiliki berbagai potensi alam untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi sebuah sektor yang maju. Tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi, sektor pertanian justru memberikan sumbangan positif terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebagai penyedia pangan serta penyumbang devisa melalui ekspor (Deptan, 2008).

Menurut Soekartawi (1988) pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang mencakup upaya untuk meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri serta memperbesar nilai ekspor, meningkatkan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendukung pembangunan daerah

Berdasarkan hal tersebut maka sektor pertanian perlu ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Data Produk Domestik Bruto (PDB)

Indonesia atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama kedua yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyumbang 15,92%, setelah industri pengolahan sebesar 25,19%. Data PDB menurut lapangan usaha di Indonesia tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, tahun 2011

No	Lapangan Usaha	PDB Tahun 2008 (%)
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	15,92
2	Pertambangan dan penggalian	11,04
3	Industri pengolahan	25,19
4	Listrik, gas dan air bersih	0,79
5	Kontribusi	10,11
6	Perdagangan, hotel dan restoran	13,80
7	Pengangkutan dan komunikasi	6,23
8	Keuangan, real estate dan jasa perusahaan	7,09
9	Jasa-jasa	9,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2012

Sektor pertanian hingga kini masih memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan, hal tersebut terlihat dari nilai PDB yang cukup tinggi. Peran strategis sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi antara lain: penyedia pangan bagi penduduk Indonesia, penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia bahan baku industri, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan dan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian (Deptan, 2008).

Keberhasilan pengembangan sektor pertanian tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat petani. Pemerintah adalah sebuah lembaga yang menentukan kebijakan di sektor pertanian, oleh karena itu pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung para pelaku usahatani. Kebijakan pemerintah harus selaras dengan kebutuhan dan keinginan petani agar tidak menimbulkan berbagai kerugian di pihak petani. Selain itu para petani memerlukan sebuah lembaga atau instansi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah agar dapat menetapkan kebijakan yang mampu mendukung usahatani mereka.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sektor pertanian menjadi sebuah sektor yang maju adalah dengan cara melakukan pengesahan UU No. 16 tahun 2006 mengenai sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Indonesia. Pemerintah menyadari pentingnya keberadaan penyuluh pertanian dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian karena penyuluh pertanian adalah orang yang langsung berinteraksi dan berhadapan dengan petani. Penyuluhan pertanian merupakan salah satu bentuk pendidikan non formal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para petani (Sumaryo, Gultom dan Listiana, 2012). Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi para petani dalam berusahatani.

Kegiatan penyuluhan pertanian mutlak diperlukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan non formal untuk pertanian dan keluarganya di pedesaan yang mempunyai

misi dan fungsi strategis, yaitu selain menjembatani antara lembaga penelitian dan praktik usahatani di pedesaan juga merupakan kegiatan yang berusaha mengubah sikap petani terhadap penerapan teknologi baru, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam berusahatani termasuk juga memecahkan permasalahan-permasalahan dalam berusahatani (Kartasapoetra, 1988).

Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap keberhasilan berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh, melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan pertanian dapat menghantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat dengan instansi terkait. Pada pelaksanaan program Bimas, penyuluhan pertanian yang dilaksanakan terkesan dilakukan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa dan biasa. Petani dipaksa melakukan teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya.

Pada era orde baru pola dan cara penyuluhan terprogram dalam program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I. Bimas diartikan sebagai kegiatan penyuluhan massal untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi khusus padi/beras, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Pada era Pelita 1, penyuluhan harus nyata menunjang pembangunan pertanian berprioritas tinggi mencapai swasembada beras. Pola dasar tata penyelenggaraan penyuluhan harus

diperkuat, meliputi kelembagaan, aparatur dan fasilitas fisiknya. Pada masa ini sejak dicanangkannya revitalisasi penyuluhan pertanian, pendekatan dari atas tidak relevan lagi, petani dan keluarganya diharapkan mengelola usahanya dengan penuh kesadaran, melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada melalui bantuan penyuluh pertanian dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, petani yakin akan mengelola usahanya dengan produktif, efisien dan menguntungkan. Pasca diberlakukannya otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar terhadap pembinaan penyuluh pertanian, yang semula dilaksanakan oleh pusat bergeser ke daerah. Beban biaya operasional pembinaan penyuluh yang semula ditanggung oleh pusat kemudian dialihkan ke kabupaten/kota.

Keterbatasan yang dimiliki oleh daerah, baik dari aspek pembiayaan dan sumberdaya aparatur, terdapat kecenderungan pembinaan terhadap penyuluh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyuluhan pertanian cenderung berubah sangat cepat, yang menuntut peningkatan kemampuan penyuluh lebih baik. Kesenjangan antara pembinaan terhadap penyuluh dengan tuntutan masyarakat terhadap aktivitas penyuluhan pertanian dewasa ini disinyalir memberikan kesan bahwa penyuluh dianggap tidak lagi bekerja dengan baik.

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu bentuk pembangunan pertanian di suatu wilayah melalui pelaksanaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran dengan tujuan agar masyarakat sasaran ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk itu kegiatan penyuluhan harus

mampu menciptakan kesadaran petani akan pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia. Pada era globalisasi dan menghadapi pasar bebas, kebijakan penyuluhan mengalami perubahan. Kebijakan yang semula untuk menjadikan petani hanya terampil berproduksi berubah menjadi kebijakan yang menciptakan iklim untuk memotivasi petani agar lebih rasional dalam mengembangkan usahatani mereka berdasarkan kemampuannya dan potensi pasar.

Perubahan kebijakan ini menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan organisasi penyuluhan pertanian yang berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Oleh karena itu pemerintah harus berperan dalam membantu penyuluh pertanian dengan cara menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai serta memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga penyuluh pertanian. Hal ini bertujuan agar penyuluh pertanian dapat memberikan kinerja yang optimal dalam rangka membantu masyarakat petani untuk meningkatkan hasil dan pendapatan usahatannya.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah antara lain; kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat di Kementerian Pertanian, kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi berupa Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh), kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota berupa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). BP3K sebagai ujung tombak kelembagaan penyuluhan pertanian yang sangat

mempengaruhi profesional penyuluh pertanian yang paling dekat yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan proses pembelajaran melalui percontohan serta pengembangan model usahatani bagi pelaku usaha (UU No. 16 Tahun 2006).

Peran dan tugas penyuluh yang ada dalam BP3K perlu dimaksimalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 052/041/B/IV.01/B/2012 tentang penetapan lokasi kelembagaan yang difasilitasi (BP3K Model) Provinsi Lampung tahun 2012, maka ditetapkan sebanyak 50 BP3K yang dijadikan BP3K Model yang difasilitasi untuk memberikan fasilitas dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan adalah dengan membentuk BP3K Model *Center of Excellence* (CoE).

Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung merancang program BP3K Model *Center of Excellence* (CoE) dalam rangka memaksimalkan peranan dan fungsi BP3K. Program CoE ini bertujuan untuk melakukan pengembangan dan penguatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. BP3K yang dijadikan sebagai subjek CoE karena lembaga ini memiliki sumber daya manusia dan sarana yang memadai yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh provinsi Lampung, sehingga diharapkan BP3K dapat memenuhi semua informasi dan teknologi yang dibutuhkan petani.

BP3K sebagai *Center of Excellence* (CoE), akan memfasilitasi peran dan partisipasi *stakeholders*, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan menurunkan biaya transaksi, menuju peningkatan daya saing produk, serta menjadi pusat informasi pertanian dan tempat pertemuan antara pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengusaha/industri/perbankan, dan kelompok tani. BP3K yang dijadikan *Pilot Project* revitalisasi BP3K sebagai CoE di Provinsi Lampung tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar BP3K Model CoE Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	Nama BP3K
1	Lampung Tengah	BP3K Terbanggi Besar
2	Tanggamus	BP3K Talang Padang
3	Tulang Bawang	BP3K Menggala
4	Lampung Timur	BP3K Batang Hari
5	Pesawaran	BP3K Padang Cermin
6	Metro	BP3K Metro Barat

Sumber : Data Bakorluh Provinsi Lampung, 2012

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Kecamatan Menggala merupakan salah satu kecamatan yang telah ditetapkan menjadi pengembangan BP3K sebagai CoE. Terpilihnya BP3K Menggala sebagai Model CoE diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyuluh dengan cara pendampingan dari Perguruan Tinggi atau Tim Fakultas Pertanian dan Pemerintah Provinsi Lampung atau Bakorluh. Bentuk pendampingan tersebut berupa pelatihan-pelatihan serta pengembangan teknologi baru yang diberikan kepada penyuluh sehingga dapat menunjang kegiatan penyuluhan. Selanjutnya informasi dan teknologi yang didapatkan oleh penyuluh dapat diteruskan ke petani yang berada di

daerah binaanya. BP3K dapat diibaratkan sebagai sebuah pasar bagi petani untuk mendapatkan segala informasi dan teknologi yang dibutuhkan.

Peningkatan kinerja menjadi sangat penting, karena sebagian besar BP3K memiliki kinerja yang sangat memprihatinkan. Lemahnya kinerja sebagian besar BP3K tidak terlepas dari rendahnya kapasitas SDM yang ada, lemahnya kemampuan menyusun program jangka panjang dan berkelanjutan, serta lemahnya daya dukung biaya operasional (Sumaryo, Gultom, dan Listiana, 2012). Selain itu banyaknya jumlah petani binaan di wilayah kerja penyuluh dan kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan juga merupakan hal yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja penyuluh. Program pelatihan yang diberikan kepada penyuluh juga masih sangat kurang.

BP3K yang kurang memadai dan tidak mampu memfasilitasi dan menyediakan sarana dan pembiayaan akan menimbulkan persoalan yang dapat menyebabkan terjadinya pengaruh perumusan program aksi BP3K dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja BP3K. Apabila program aksi perumusannya kurang komprehensif menjabarkan dan menjembatani antara tujuan organisasi dengan kebutuhan petani, maka dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi dan perilaku petani pada taraf yang rendah dan dapat mengakibatkan tujuan organisasi tidak tercapai dan perilaku petani tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

BP3K merupakan wadah bernaungnya para penyuluh pertanian dalam melakukan koordinasi, perencanaan dan pengelolaan program penyuluhan, akan menimbulkan persoalan apabila tidak ada fasilitas dan sumber daya

yang memadai sebagai penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kinerja BP3K yang rendah, selain tujuan organisasi tidak tercapai juga berdampak pada pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Hal tersebut yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk meneliti kinerja penyuluh di BP3K Menggala sebagai BP3K Model CoE yang dihadapkan pada masalah kurangnya sarana prasarana serta pelatihan yang diberikan kepada penyuluh, sedangkan kinerja penyuluh di BP3K Menggala diharapkan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?
2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan terhadap kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi Dinas Pertanian atau instansi yang terkait dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
2. Bahan informasi bagi lembaga penyuluh lainnya dalam pengembangan penyuluhan.
3. Bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penyuluhan Pertanian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2006, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia.

Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai pendidikan nonformal yang ditujukan kepada petani dan keluarganya dengan tujuan jangka pendek untuk mengubah perilaku termasuk sikap, tindakan dan pengetahuan kearah yang lebih baik, serta tujuan jangka panjang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Falsafah dasar penyuluhan pertanian adalah pendidikan, demokrasi, dan berkesinambungan. Sifat dari pendidikan dalam penyuluhan pertanian adalah pendidikan nonformal, sedangkan demokrasi pada hakikatnya mengandung pengertian bahwa petani mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya, dan berkesinambungan dapat diartikan sebagai kegiatan yang terus menerus (Sastraatmadja, 1986).

Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat dicapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Berdasarkan hal tersebut maka penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai suatu usaha atau upaya untuk merubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya (Kartasapoetra, 1987). Menurut Ir. Salmon Padmanagara dalam Suhardiyono (1988) penyuluhan pertanian diartikan sebagai sistem pendidikan diluar sekolah (nonformal) untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraanya sendiri serta masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, sasaran yang ingin dicapai juga berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani sehingga mereka akan mampu untuk mandiri, karena tanpa adanya penambahan pengetahuan dan ketrampilan serta perbaikan sikap mereka, mereka akan sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka yang masih tradisional. Maka dari itu peran penyuluhan pertanian adalah jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara sumber pengetahuan dan para praktisi, sehingga harus ada komunikasi dua arah antara sumber pengetahuan dan para praktisi. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian agar penyampaian informasi baru yang berupa hasil penelitian dari sumber informasi segera dapat disampaikan dan diterima oleh para praktisi terutama petani maka harus ada hubungan erat antara tiga unsur pokok pertanian yaitu: penelitian pertanian, pendidikan pertanian dan penyuluhan pertanian (Suhardiyono, 1988).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2006, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) yang selanjutnya disebut penyuluh PNS merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga

yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Menurut Kartasapoetra (1987), penyuluh pertanian adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju. Kartasapoetra (1987) menyatakan bahwa seorang penyuluh pertanian dalam tugasnya mempunyai tiga peranan penting, yaitu:

- 1) Berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam budidaya tanaman, agar para petani lebih terarah dalam usahatani, meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-kegagalan dalam usaha taninya.
- 2) Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi para petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan mau menerapkan cara-cara bertani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga hidupnya akan lebih sejahtera.
- 3) Berperan sebagai penasihat, yang dapat melayani, memberi petunjuk-petunjuk dan membantu petani baik dalam bentuk peragaan atau memberikan contoh-contoh kerja dalam usahatani dalam memecahkan segala masalah yang dihadapi para petani.

Menurut Suhardiyono (1989), seorang penyuluh membantu para petani di dalam usaha mereka meningkatkan produksi dan mutu hasil produksinya guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penyuluh mempunyai banyak peran, antara lain:

1) Sebagai pembimbing petani

Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru petani dalam pendidikan nonformal. Penyuluh harus mampu memberikan praktek demonstrasi tentang sesuatu cara atau metode budidaya sesuatu tanaman, membantu petani menempatkan atau menggunakan sarana produksi pertanian dan peralatan yang sesuai dengan tepat.

Penyuluh harus mampu memberikan bimbingan kepada petani tentang sumber dana kredit yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan usahatani mereka dan mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan petani yang berasal dari instansi-instansi yang terkait.

2) Sebagai organisator dan dinamisator petani

Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, para penyuluh lapang tidak mungkin mampu untuk melakukan kunjungan kepada masing-masing petani, sehingga petani harus diajak untuk membentuk kelompok-kelompok tani dan mengembangkannya menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang mempunyai peran dalam mengembangkan masyarakat di sekitarnya.

3) Sebagai teknisi

Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik, tanpa adanya pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik maka akan sulit baginya dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi yang diminta petani.

- 4) Sebagai jembatan penghubung antara lembaga peneliti dengan petani
Penyuluh bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian kepada petani. Sebaliknya petani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada penyuluh yang membinanya sebagai jembatan penghubung, selanjutnya penyuluh menyampaikan hasil penerapan teknologi yang dilakukan oleh petani kepada lembaga penelitian yang terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut.

Dalam prakteknya penempatan penyuluh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penyuluh lapangan, yaitu penyuluh yang ditempatkan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
2. Penyuluh tingkat kecamatan, yaitu penyuluh yang ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
Penyuluh tingkat kecamatan seringkali disebut dengan Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP).
3. Penyuluh pertanian tingkat kabupaten, yaitu penyuluh yang ditempatkan di Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan (BP4K). Penyuluh tingkat kabupaten seringkali disebut dengan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS).

4. Penyuluh pertanian tingkat propinsi, yaitu penyuluh yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
5. Penyuluh pertanian tingkat nasional, yaitu penyuluh yang ditempatkan pada kelembagaan penyuluhan tingkat pusat yang merupakan badan yang menangani penyuluhan pada setiap Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

2.1.2 Teori Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja, namun kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk berlangsungnya suatu proses pekerjaan. Menurut Mangkunegara dan Prabu dalam Thoriq (2000), kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Sulistiyani (2003), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dinilai dari hasil kerjanya.

Berdasarkan definisi diatas kinerja merupakan kemampuan menjalankan pekerjaan dan pencapaian standar kerja atau suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang

dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut Kartasapoetra (1988), sifat-sifat yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian yang sebenarnya dapat menggambarkan kinerja penyuluh adalah memiliki disiplin kerja yang kuat, tekun, tahu akan tugasnya dan tidak cepat putus asa.

Menurut Suhardiyono (1992), syarat-syarat yang harus ada dalam diri penyuluh pertanian adalah:

- a. Kemampuan berkomunikasi dengan petani. Agar dapat berkomunikasi dengan petani, maka seorang penyuluh harus memiliki dasar-dasar pengetahuan praktik usahatani, dapat memahami bagaimana kehidupan petani, kemampuan mengenal orang desa dan mau mendengarkan serta mau mengerti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh mereka.
- b. Kemampuan bergaul dengan orang lain. Agar dapat menyatu dengan petani, maka seorang penyuluh harus memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain.
- c. Antusias terhadap tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penyuluh memerlukan tanggung jawab yang besar, karena sebagian besar waktunya dipergunakan untuk bekerja sendiri dengan bimbingan dan pengawasan yang sangat minim, sehingga sebelum bertugas seorang penyuluh harus mengerti dan menghayati betapa besar tanggung jawab yang harus ditanggungnya.

- d. Berpikir logis dan berinisiatif. Berpikir logis merupakan pengertian praktis yang harus dimiliki oleh seseorang, biasanya diperoleh dari pengalaman hidup, sedangkan inisiatif adalah kemampuan seseorang untuk melihat apakah ada sesuatu hal yang perlu dilakukan dan mempunyai keberanian untuk berusaha melakukan sesuatu hal tersebut tanpa perintah atau saran dari orang lain.

Penilaian kinerja seorang penyuluh pertanian dapat didasarkan pada indikator kinerja penyuluh menurut Departemen Pertanian (2010) yaitu antara lain:

1. Tersusunnya program penyuluhan
2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyuluh pertanian
3. Tersusunnya data wilayah untuk pengembangan teknologi spesifikasi lokasi
4. Terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata
5. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha
6. Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan
7. Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi
8. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja
9. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap organisasi penyuluhan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan organisasi penyuluhan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi tenaga penyuluh pertanian dalam mencapai sasaran organisasi penyuluhan dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja sangat berperan nantinya dalam proses evaluasi kinerja organisasi penyuluhan. Evaluasi kinerja adalah proses membandingkan antara kinerja aktual dan target yang telah direncanakan oleh manajemen, untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi penyuluhan dan untuk mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Deptan (2007), untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan fasilitas kerja merupakan unsur yang penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian.

Ketersediaan penyuluhan juga berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dalam membantu para petani untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraannya.

Keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan pertanian tidak terlepas dari kinerja tenaga penyuluh pertanian. Kinerja penyuluh pertanian dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mendorong seorang penyuluh dalam membentuk peroduktivitas dan kinerjanya.

Menurut Henry Simamora dalam Y. Kurniawan (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

a. Karakteristik Situasi.

Karakteristik situasi dapat dilihat dari bagaimana lingkungan dan organisasi mempengaruhi pelaksanaan kinerja di dalam organisasi. Lingkungan menempatkan tuntutan-tuntutan organisasi dari para karyawan terhadap pekerjaannya. Organisasi juga mempengaruhi kinerja, menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk penilaian.

b. Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja karyawan.

Karena pekerjaan yang berbeda mempunyai deskripsi pekerjaan yang berbeda, maka program evaluasi kinerja haruslah menyediakan cara yang sistemik untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini dan memastikan evaluasi yang konsisiten di seluruh pekerjaan.

c. Tujuan-tujuan penilaian kinerja.

Tujuan penilaian kinerja khusus secara mendasar dapat digolongkan kepada dua bagian besar yaitu evaluasi dan pengembangan.

d. Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi.

Keberhasilan suatu organisasi secara umum ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut. Karyawan

merupakan kelompok orang-orang terkecil dalam suatu organisasi dan ditempatkan di baris paling depan yang mempunyai arti cukup besar dalam mencapai tujuan perusahaan.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Lenvin dan Dwiyanto dalam Luneto (1998), yaitu meliputi :

1. Responsivitas, yaitu kemampuan penyuluh dalam mengidentifikasi dan mengakomodir kebutuhan petani serta menyusun rencana kerja sesuai dengan kebutuhan petani.
2. Responsibilitas, yaitu tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan, realisasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, serta memberikan manfaat bagi petani.
3. Kualitas layanan, yaitu melaksanakan latihan dan kunjungan, kecepatan dalam memberikan pelayanan informasi, serta ketepatan materi dan metode penyuluhan.

Menurut Prawiro (1981), efektivitas seorang penyuluh dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh umur. Umur erat kaitannya dengan kemampuan fisik dan daya berpikir seseorang.

Pembagian yang lebih teliti untuk menunjukkan struktur penduduk ialah dengan membuat tiga golongan utama: golongan muda dengan umur 14 tahun ke bawah, golongan penduduk produktif dengan umur 15 sampai 64 tahun, dan golongan tua berumur 65 tahun ke atas.

Golongan muda dan tua disebut golongan tidak produktif atau golongan

tergantung, sebab secara potensi mereka dipandang sebagai bagian penduduk yang tidak aktif secara ekonomi sehingga penghidupan mereka bergantung pada bagian penduduk yang produktif.

Pendidikan penyuluhan dapat membantu manajer dan agen penyuluhan membuat keputusan yang rasional mengenai tujuan dan metode penyuluhan, dengan memperhatikan tujuan dan metode tersebut. Agen penyuluhan yang ingin memberikan saran kepada petani harus mengerti tentang proses penyuluhan dan memiliki pengetahuan teknis yang memadai mengenai disiplin ilmu yang akan dibicarakan (A.W. Van Den Ban dan H.S. Hawkins, 1998). Penyuluh Pertanian harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam membina para petani, keterampilan dan keahlian tersebut diperoleh melalui proses pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Menurut Ahmadi dan Ubiyati (2001), pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah, sedangkan menurut Combs dan Ahmed (1984), pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang sangat dilembagakan, bertahap kronologis, dan bertata tingkat mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat-tingkat tertinggi.

Menurut Ahmadi dan Ubiyati (2001), pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat. Menurut Suhardiyono.L (1992),

pendidikan nonformal adalah pengajaran sistematis yang diorganisir di luar sistem pendidikan formal bagi sekelompok orang untuk memenuhi keperluan khusus. Sedangkan menurut Joesef (1992) yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

Sifat-sifat dari pendidikan nonformal menurut Joesef (1992) adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan nonformal lebih fleksibel, sifat fleksibel di atas dalam arti luas seperti tidak ada tuntutan syarat *credential* yang keras bagi anak didiknya, waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa hari saja.
- b. Pendidikan nonformal mungkin lebih efektif dan efisiensi untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat efektif oleh karena program pendidikan nonformal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan sayarat-syarat (guru, metode, fasilitas lain) secara ketat dan tempat penyelenggaraannya pun dapat dimana saja, seperti di sawah, di bengkel, di rumah, di pasar dan di tempat kerja lain.
- c. Pendidikan nonformal bersifat *quick yielding*, artinya dalam waktu singkat dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan, karena untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan.

- d. Pendidikan nonformal sangat instrumental, artinya pendidikan yang bersangkutan bersifat luwes, mudah dan murah serta dapat menghasilkan dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Parker dalam Kartasapoetra (1988), menyatakan bahwa seorang pegawai akan mencurahkan tenaga, waktu dan sumber daya yang dimilikinya lebih banyak pada pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan bila dua orang mempunyai pekerjaan yang sangat mirip tetapi menerima gaji yang lebih jauh berbeda maka akan menghasilkan perilaku kerja yang berbeda pula, bagi yang menerima gaji yang lebih rendah maka akan kurang bersemangat dalam bekerja dan akan menghasilkan kerja yang bermutu rendah.

Pendapatan merupakan penerimaan hasil yang telah dikurangi dengan biaya-biaya selama produksi. Pendapatan usaha tani diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh petani dalam berusaha tani selama satu tahun yang diperhitungkan sebagai hasil penjualan atau pertukaran produksi usahatannya (Hernanto, 1991).

Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis, perlu mendapat pertimbangan dalam penempatan tenaga kerja. Kenyataan menunjukkan semakin lama tenaga kerja bekerja, semakin banyak pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. Sebaliknya semakin singkat masa kerja, maka semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian dan

keterampilan kerja, sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki semakin rendah (Sastrohadiwiryo, 2001).

Bila seorang penyuluh pertanian membawahi begitu luas wilayah kerja maka penyuluh akan kewalahan dan banyak daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau pembinaannya, sehingga efektivitas penyuluhan yang dilaksanakannya pun secara otomatis akan menurun. Semakin luas wilayah kerja seseorang, maka jangkauan kerja dan kinerjanya akan menurun. Hal ini berkaitan dengan rentang kendali dan tanggungjawab seseorang (Kartikasari 2001). Menurut Hasibuan (1986, dalam Kartikasari, 2001), semakin luas rentang kendali, maka pengawasan semakin tidak efektif dan akan menurun daya jangkauannya. Semakin rendah pengawasan maka prestasi kerja akan semakin menurun.

Menurut Departemen Pertanian (2007), untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Sarana dan fasilitas kerja merupakan unsur yang penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian. Ketersediaan sarana dan fasilitas kerja juga berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dalam membantu para petani untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Menurut Kartasapoetra (1988), agar kegiatan penyuluhan pertanian

dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sarana dan fasilitas antara lain:

1. Bangunan yang berupa bangunan perkantoran BP3K yang telah dilengkapi dengan fasilitas listrik, jaringan telepon, *computer*, dan jaringan *internet*.
2. Ketersediaan lahan demplot di sekitar BP3K untuk menunjang kegiatan praktik penyuluhan, pengujian dan percontohan.
3. Mobilitas yang berupa alat-alat yang berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar penyuluh untuk datang ke lokasi penyuluhan atau wilayah binaan.
4. Perlengkapan penyuluhan yang berupa *leaflet*, brosur dan buku-buku yang berkaitan dengan pertanian.
5. Dana pembiayaan sebagai perangsang bagi penyuluh untuk keperluan hidup dan pelaksanaan tugasnya.

2.1.3 Kelembagaan Penyuluhan

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) merupakan lembaga penyuluhan yang berada di tingkat kecamatan. Sebelum berubah menjadi BP3K, dahulu lebih dikenal dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Balai penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia No. 16 tahun 2006, Balai Penyuluhan memiliki tugas antara lain:

1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota.
2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 052/041/B/IV.01/B/2012, BP3K Model merupakan percontohan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan yang dirancang untuk menyediakan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasi agribisnis sesuai komoditas unggulan di wilayah setempat yang memadai dan mampu member pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Kegiatan yang ada pada BP3K Model antara lain:

- a. Pelaksanaan *Practicatory Rural Appraisal* (PRA)

PRA merupakan suatu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program operasional dalam pembangunan tingkat desa. Tujuan utama dari PRA adalah menjangkau atau program pembangunan pedesaan yang memenuhi persyaratan. Syarat tersebut yaitu dapat diterima oleh masyarakat setempat, secara ekonomi menguntungkan dan berdampak positif bagi lingkungan.

b. Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

RDK adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk masa satu tahun yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.

c. Kaji terap

Kaji terap adalah salah satu metode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memilih paket teknologi usahatani yang telah direkomendasikan. Pelaksanaan kaji terap bertujuan untuk meyakinkan paket teknologi usahatani yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta kondisi usahatani petani dan sosial ekonomi petani di wilayahnya serta mempercepat penyebaran informasi teknologi pertanian yang telah direkomendasikan secara umum.

d. Percontohan atau Demplot

Demplot merupakan wahana percontohan penerapan teknologi yang sesuai dengan rekomendasi untuk dapat dicontoh oleh petani sebagai peserta kursus tani sekaligus sebagai media pembuktian keunggulan pendekatan dan teknologi yang dianjurkan. Demplot merupakan kegiatan lanjutan setelah kaji terap yang dilaksanakan oleh peserta kursus tani dan kaji terap.

e. Kursus Tani

Kursus tani merupakan tindak lanjut dari kegiatan PRA, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan petani serta mampu menerapkan teknologi yang menguntungkan yang diberikan melalui penyampaian materi-materi pada kursus tani.

f. Latihan dan Kunjungan (LAKU)

LAKU merupakan salah satu kegiatan penyuluhan pertanian dan menjadi kegiatan yang rutin dilakukan dalam penyuluhan. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktik fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif. Sedangkan kunjungan adalah kegiatan penyuluh kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.

g. Media informasi

Salah satu tujuan pembentukan BP3K Model adalah menjadi kelembagaan (BP3K) yang dapat dijadikan contoh untuk BP3K

lainnya. Oleh karena itu BP3K Model harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan mendukung penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Media informasi dan *data base* meliputi sarana informasi (brosur, *leaflet*, papan *display* informasi *data base*), monografi wilayah, data kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau penyuluh pertanian beserta jenis usaha dan kepemilikan lahan serta lain sebagainya.

- h. Pemutakhiran *data base* kelembagaan/ketenagaan penyuluhan
- Pemutakhiran *data base* kelembagaan/ketenagaan penyuluhan adalah pembuatan *data base* kelembagaan penyuluhan yang aktual dan akurat. Untuk mampu menjadi *entry point* program sekaligus mengawal program, BP3K harus dikuatkan/ditingkatkan kapasitasnya, sehingga menjadi semacam *Center of Excellence* (CoE). BP3K dijadikan sebagai subyek CoE karena lembaga ini memiliki sumber daya manusia dan sarana yang memadai yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh Provinsi Lampung, sehingga diharapkan BP3K dapat memenuhi semua informasi dan teknologi yang dibutuhkan petani.

Pengembangan BP3K menjadi CoE diharapkan akan menjadi pusat informasi pertanian dan tempat pertemuan antara pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengusaha/industri/perbankan dan kelompok tani. Interaksi yang intensif antara pihak-pihak tersebut di BP3K akan menjadi wahana yang efektif untuk mencari solusi berbagai masalah

atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi program di lapang. BP3K sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sehingga kinerja penyuluh akan meningkat dengan pendampingan dari Tim Fakultas Pertanian, Bakorluh dan Pemerintah Provinsi Lampung.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Thoriq (2008), dalam skripsinya yang berjudul Kinerja Penyuluh Pertanian Lapang dan Hubungannya dengan Tingkat Kemajuan Usahatani Jeruk di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Koefisien Kontingensi* dan uji *Fisher*, dimana *variabel dependen* (Y) adalah kinerja PPL dan *variabel independen* (X) yang direkomendasikan meliputi umur (X_1), pendidikan formal (X_2), pendidikan nonformal (X_3), pendapatan rumah tangga PPL (X_4), lama bertugas (X_5), jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas (X_6) dan fasilitas kerja (X_7). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja PPL adalah: umur, pendidikan formal dan jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2005) yang bertujuan untuk mengetahui kinerja PPL di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja PPL di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa, kinerja PPL dalam melaksanakan tugas-tugas

pokok penyuluhan pertanian di Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam klasifikasi sedang, sedangkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* menunjukkan bahwa ada hubungan yang nyata antara pendidikan formal dengan kinerja PPL. *Variabel* lainnya yaitu : umur, pendapatan PPL, lama bertugas, jarak tempat tinggal ke tempat bertugas, fasilitas kerja dan sikap terhadap kebijakan pemerintah tidak berhubungan nyata terhadap kinerja PPL.

Ningsih (2006), melakukan penelitian mengenai hubungan antara kinerja PPL dengan kemampuan kelompok tani. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tingkat kinerja PPL meliputi kemampuan mengajarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS), mengembangkan swadaya dan swakarsa petani, menggali dan mengembangkan sumberdaya, kemampuan mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani nelayan dan keluarganya dalam usahatani serta membantu memecahkan masalahnya, kemampuan menyusun laporan berada pada kategori sedang, kemampuan PPL dalam membantu dan menyiapkan petunjuk informasi pertanian termasuk kategori rendah. Tingkat kemampuan kelompok tani meliputi kemampuan merencanakan kegiatan, kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian, kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan, kemampuan meningkatkan hubungan lembaga dengan koperasi, kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi pertanian termasuk dalam kategori sedang dan terdapat hubungan antara kinerja penyuluh pertanian lapang dengan kemampuan kelompok tani.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2012), yang berjudul Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Produktivitas Usahatani Padi di Kabupaten Tanggamus (Kasus di Wilayah BP3K Model dan Non Model), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja PPL di BP3K Model dengan kinerja PPL di BP3K Non Model pada taraf kepercayaan 99%. PPL di BP3K Model dalam melaksanakan tugas pokoknya masih tergolong sedang, terutama dalam penyusunan program, RKT, data peta wilayah, penyebaran informasi dan teknologi pertanian, menumbuhkembangkan keberdayaan dan kemandirian petani serta mewujudkan akses petani ke lembaga keuangan.

Murniati dan Aviati (2005), melakukan penelitian mengenai kinerja penyuluh pertanian dalam penerapan teknologi pertanian padi sawah di Lampung Selatan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kinerja penyuluh pertanian wanita dalam hal membantu dan mengajar pada kursus tani, mengembangkan swadaya dan swakarsa petani, membantu dan menyiapkan petunjuk informasi pertanian, menggali dan mengembangkan sumberdaya serta menyusun laporan di Lampung Selatan masih sedang. Kinerja penyuluh pertanian wanita berhubungan nyata dengan tingkat kemampuan kelompok tani dan pendapatan penyuluh wanita, sedangkan tingkat penerapan teknologi pertanian padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan tidak berhubungan nyata, karena tingkat penerapan teknologi yang ada sudah berada pada tingkat tinggi karena irigasi sudah baik.

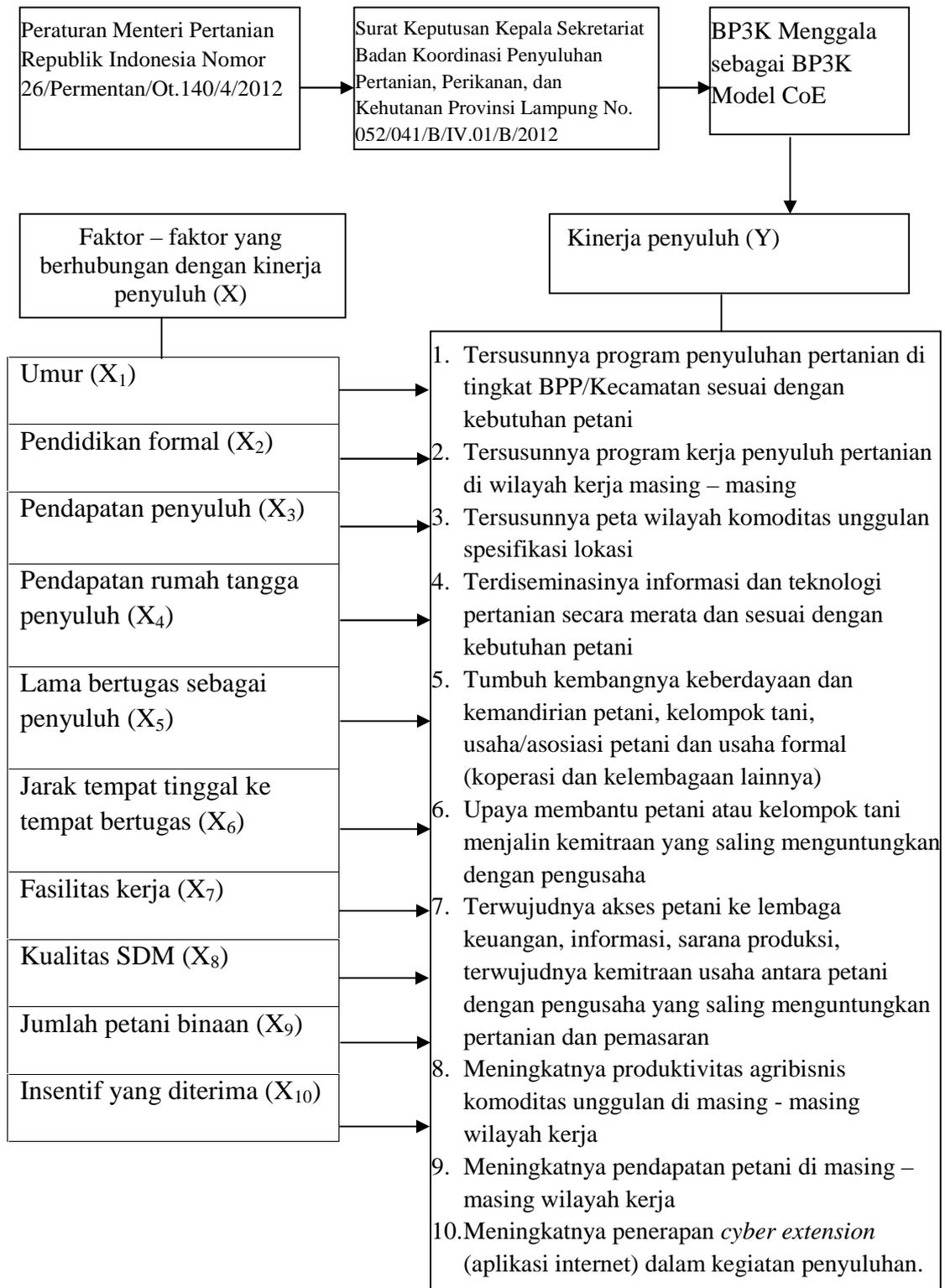
2.2 Kerangka Pemikiran

Terdapat dua aspek utama yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu kinerja penyuluh pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian, selain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya.

Pengembangan pembangunan pertanian di masa mendatang perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Banyak faktor yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menyebabkan proses pembangunan pertanian tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dan organisasi penyuluhan harus dapat memberikan kontribusi secara nyata dalam rangka memotivasi penyuluh pertanian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kinerja penyuluh pertanian dapat dilihat dari beberapa faktor yang dijadikan sebagai *variabel Y* dalam penelitian ini. Menurut Departemen Pertanian dan berdasarkan indikator program BP3K Model CoE di Fakultas Pertanian Unila Faktor-faktor tersebut antara lain : (1) tersusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat BPP/Kecamatan sesuai dengan kebutuhan petani, (2) tersusunnya program

kerja penyuluh pertanian di wilayah kerja masing-masing, (3) tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan spesifikasi lokasi, (4) terdiseminasinya informasi dan teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani, (5) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, usaha/asosiasi petani, dan usaha formal (koperasi dan kelembagaan lainnya), (6) upaya membantu petani atau kelompok tani menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pengusaha, (7) terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi, terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan pertanian dan pemasaran, (8) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja, (9) meningkatnya pendapat petani di masing-masing wilayah kerja, (10) meningkatnya penerapan *cyber extension* (aplikasi internet) dalam kegiatan penyuluhan.

Peningkatan atau penurunan kinerja penyuluh pertanian diduga berhubungan dengan beberapa faktor antara lain : umur, pendidikan formal, pendapatan penyuluh, pendapatan rumah tangga penyuluh, lama bertugas sebagai penyuluh, jarak tempat tinggal ke tempat bertugas, fasilitas kerja, kualitas SDM dan jumlah petani binaan. Indikator untuk mengukur kinerja penyuluh pertanian BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari kinerja penyuluh tersebut. Uraian kerangka pemikiran disajikan dalam paradigma kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang tertera pada Gambar 1.



Gambar 1 : Paradigma Kinerja Penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara umur dengan kinerja penyuluh.
2. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara pendidikan formal dengan kinerja penyuluh.
3. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara pendapatan dengan kinerja penyuluh.
4. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara pendapatan rumah tangga dengan kinerja penyuluh.
5. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara lama bertugas dengan kinerja penyuluh.
6. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara jarak tempat tinggal ke tempat bertugas dengan kinerja penyuluh.
7. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara fasilitas kerja dengan kinerja penyuluh.
8. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara peningkatan kualitas SDM dengan kinerja penyuluh.
9. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara jumlah petani binaan dengan kinerja penyuluh.
10. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara insentif yang diterima dengan kinerja penyuluh.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran *Variabel*

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai *variabel-variabel* yang akan diteliti untuk memperoleh dan menganalisis data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari *variabel X* dan *variabel Y*, *variabel-variabel* tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. *Variable Independen (X)*

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Penyuluh Pertanian:

- a. Umur adalah usia penyuluh yang diukur sejak lahir sampai dengan waktu penelitian dilakukan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan tahun. Indikator umur penyuluh ditunjukkan dengan akte kelahiran atau surat keterangan dari pemerintah setempat. Umur diklasifikasikan berdasarkan data lapangan menjadi muda, sedang dan tua.
- b. Tingkat pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penyuluh pada sekolah formal mulai dari SD, SLTP, SMA / SPMA, Diploma III sampai pendidikan sarjana (strata 1). Indikator tingkat pendidikan formal ditunjukkan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Tingkat formal pendidikan diukur berdasarkan

jumlah tahun yang ditempuh berdasarkan klasifikasi data lapang dan diklasifikasikan menjadi tingkat pendidikan tinggi, tingkat pendidikan sedang, dan tingkat pendidikan rendah.

- c. Tingkat pendapatan penyuluh adalah jumlah pendapatan yang diperoleh penyuluh karena usaha atau kerja sebagai penyuluh/kedinasan yaitu: gaji dan tunjangan dalam bulan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan rupiah. Indikator pendapatan penyuluh ditunjukkan dengan slip gaji penyuluh.
- d. Tingkat pendapatan rumah tangga adalah penjumlahan dari seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga penyuluh yang bekerja dalam sebulan di luar pendapatan penyuluh, pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan rupiah. Indikator pendapatan rumah tangga ditunjukkan dengan slip gaji seluruh anggota keluarga yang bekerja.
- e. Lama bertugas penyuluh adalah lama penyuluh menjalankan tugasnya sebagai penyuluh sejak diangkat menjadi penyuluh hingga tahun penelitian dilakukan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan tahun. Indikator lama bertugas atau masa kerja penyuluh ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai penyuluh. Semakin lama masa kerja dalam melakukan pekerjaan di bidang yang sama, maka pelaksanaan program diharapkan akan semakin efektif.
- f. Jarak tempat tinggal adalah jarak rata-rata yang harus ditempuh oleh penyuluh untuk sampai ke lokasi tempat memberikan penyuluhan atau

pada wilayah binaannya, diukur dengan satuan kilometer. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan data lapangan menjadi dekat, cukup jauh dan jauh. Indikatornya adalah *speedometer* kendaraan bermotor dan pernyataan tentang jarak tempuh yang dilalui oleh penyuluh.

- g. Fasilitas kerja adalah kelengkapan fasilitas dan sarana kerja yang diterima penyuluh yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan penyuluhan. Fasilitas kerja diukur menggunakan pertanyaan yang berdasarkan pada kelengkapan fasilitas kerja dan kondisi sarana atau fasilitas kerja.
- h. Kualitas SDM adalah seberapa sering penyuluh mengikuti pelatihan, *workshop*, maupun seminar yang berkaitan dengan pengembangan pertanian. Peningkatan kualitas SDM diukur dari kuantitas dan kualitas pelatihan, *workshop*, maupun seminar yang diikuti oleh penyuluh. Indikator peningkatan kualitas SDM berupa sertifikat pelatihan, *workshop*, maupun seminar. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan data lapangan menjadi baik, cukup dan rendah.
- i. Jumlah petani binaan adalah jumlah petani yang berada di wilayah kerja penyuluh yang diukur dalam satuan orang. Jumlah petani binaan diklasifikasikan berdasarkan data lapangan menjadi rendah, sedang dan tinggi. Indikatornya adalah data jumlah petani dari balai penyuluh atau pemerintah setempat.
- j. Insentif yang diterima adalah insentif berbentuk uang yang diterima oleh penyuluh dari pemerintah kabupaten/kota, diluar gaji dan tunjangan penyuluh dalam menunjang kegiatan penyuluhan pertanian

yang diukur dengan menggunakan satuan rupiah. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan data lapangan menjadi baik, cukup dan sedang. Indikator dari insentif penyuluh adalah slip gaji penyuluh.

Pengukuran *variabel independen* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Variabel*, definisi operasional, indikator pengukuran, dan skor/ukuran kinerja penyuluh.

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator pengukuran	Ukuran
1	Umur	Umur adalah usia penyuluh yang diukur sejak lahir sampai dengan waktu penelitian dilakukan.	Akte kelahiran atau surat keterangan dari pemerintah setempat	Tahun
2	Tingkat pendidikan formal	Tingkat pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penyuluh pada sekolah formal mulai dari SD, SLTP, SMA / SPMA, Diploma III sampai pendidikan sarjana (strata 1).	Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)	Tahun
3	Tingkat pendapatan penyuluh	Tingkat pendapatan penyuluh adalah jumlah pendapatan yang diperoleh penyuluh karena usaha atau kerja sebagai penyuluh/kedinasan yaitu: gaji dan tunjangan dalam bulan	Slip gaji penyuluh	Rupiah

Tabel 3. *Lanjutan*

NO	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Ukuran
4	Tingkat pendapatan rumah tangga	Tingkat pendapatan rumah tangga adalah penjumlahan dari seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga penyuluh yang bekerja dalam sebulan diluar pendapatn penyuluh.	Slip gaji seluruh anggota keluarga yang bekerja	Rupiah
5	Lama bertugas penyuluh	Lama bertugas penyuluh adalah lama penyuluh menjalankan tugasnya sebagai penyuluh sejak diangkat hingga tahun penelitian dilakukan.	Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai penyuluh	Tahun
6	Jarak tempat tinggal	Jarak tempat tinggal adalah jarak rata-rata yang harus ditempuh oleh penyuluh untuk sampai ke lokasi tempat memberikan penyuluhan atau pada wilayah binaannya	Speedometer kendaraan bermotor dan pernyataan tentang jarak tempuh yang dilalui oleh penyuluh	Kilometer
7	Fasilitas kerja	Fasilitas kerja adalah kelengkapan fasilitas dan sarana kerja yang diterima penyuluh yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan penyuluhan.	Kelengkapan fasilitas berdasarkan jumlah, kualitas, dan fungsi.	Lengkap atau tidak lengkap
8	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kualitas SDM adalah seberapa sering penyuluh mengikuti pelatihan, <i>workshop</i> , maupun seminar yang berkaitan dengan pengembangan pertanian.	Sertifikat pelatihan, <i>workshop</i> , maupun seminar	Kuantitas dan kualitas pelatihan, <i>workshop</i> , maupun seminar yang diikuti oleh penyuluh dalam satu tahun terakhir

Tabel 3. *Lanjutan*

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Ukuran
9	Jumlah petani binaan	Jumlah petani binaan adalah jumlah keluarga petani yang berada di wilayah kerja penyuluh.	Data jumlah petani dari balai penyuluh atau pemerintah setempat	Jumlah orang atau petani
10	Insentif yang diterima	Insentif yang diterima adalah insentif berbentuk uang yang diterima oleh penyuluh dari pemerintah kabupaten/kota, diluar gaji dan tunjangan penyuluh dalam menunjang kegiatan penyuluhan pertanian.	Slip gaji penyuluh	Rupiah

3.1.2. *Variabel Dependen (Y)*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja penyuluh di BP3K Menggala sebagai BP3K Model CoE. Kinerja penyuluh pertanian lapangan merupakan suatu hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pokoknya sebagai penyuluh pertanian lapangan di BP3K. Penilaian kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program BP3K Model CoE berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyuluh pertanian di BP3K Menggala. Penilaian kinerja diukur berdasarkan pada sepuluh indikator yang terdiri dari sembilan indikator kinerja penyuluh pertanian menurut Departemen Pertanian dan satu indikator program BP3K Model CoE di Fakultas Pertanian Unila, meliputi:

1. Tersusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat BP3K sesuai dengan kebutuhan petani.

Tersusunnya program penyuluhan pertanian merupakan keberhasilan penyuluh pertanian dalam menyusun program, dengan tahapan penyusunan program dimulai dari perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, penetapan rencana monitoring dan evaluasi serta penyempurnaan. Tersusunnya program penyuluhan diukur dengan menggunakan pertanyaan, yang berjumlah 4 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 20 dan skor terendah 4, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

2. Tersusunnya rencana kerja penyuluh pertanian di wilayah kerja masing-masing.

Tersusunnya rencana kerja penyuluh merupakan ukuran keberhasilan penyuluh dalam menyusun rencana kerja. Indikator ini diukur dari frekuensi pembaharuan rencana kerja tahunan, acuan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, tahapan penyusunan serta persentase terlaksananya kegiatan penyuluhan yang tercantum dalam rencana kerja tahunan. Pertanyaan yang digunakan berjumlah 4 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 20 dan skor terendah 4, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan rendah, sedang dan tinggi.

3. Tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan spesifik lokasi.
Indikator ini diukur dari unsur-unsur yang terdapat didalam peta

wilayah, metode yang digunakan penyuluh dalam mendapatkan data peta wilayah, serta frekuensi pembaharuan data peta wilayah.

Tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan diukur dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan berjumlah 5 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 25 dan skor terendah 5, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

4. Terdiseminasinya informasi dan teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani.

Terdiseminasinya informasi dan teknologi pertanian merupakan ukuran keberhasilan penyuluh dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi teknologi pertanian. Indikator ini diukur berdasarkan keaktifan penyuluh dalam menyediakan informasi teknologi pertanian, media yang digunakan penyuluh dalam menyampaikan informasi kepada petani, sumber informasi serta bentuk penyampaian informasi teknologi pertanian. Pengukuran indikator ini menggunakan pertanyaan yang berjumlah 6 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 30 dan skor terendah 6, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

5. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, usaha/asosiasi petani dan usah formal (koperasi dan kelembagaan lainnya).

Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani diukur dari perkembangan kelompok tani binaan, syarat-syarat kelompok tani atau gabungan kelompok tani serta kemitraan yang menunjang kemandirian petani baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana produksi maupun permodalan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang berjumlah 5 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 25 dan skor terendah 5, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

6. Upaya membantu petani/kelompok tani menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pengusaha. Upaya membantu petani/kelompok tani menjalin kemitraan diukur dari bentuk dan pola kemitraan usaha yang terbentuk antara pelaku usaha dengan petani binaan, peningkatan produktifitas usaha tani petani di daerah binaan serta peran penyuluh dalam memberikan informasi pasar dan harga kepada petani. Variabel ini diukur dengan menggunakan pertanyaan yang berjumlah 4 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 20 dan skor terendah 4, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.
7. Terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi, terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan pertanian dan pemasaran.

Terwujudnya akses petani ke lembaga diukur dari peran aktif penyuluh dalam menyediakan informasi lembaga keuangan, peran penyuluh dalam menyediakan sarana produksi, macam-macam informasi sarana produksi dan lembaga keuangan yang diberikan penyuluh kepada petani. Pengukuran indikator ini menggunakan pertanyaan yang berjumlah 4 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 20 dan skor terendah 4, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

8. Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi unggulan di masing-masing wilayah kerja.

Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi unggulan diukur dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan berjumlah 2 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 10 dan skor terendah 2, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

9. Meningkatnya pendapatan petani di masing-masing wilayah kerja.

Meningkatnya pendapatan petani diukur dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan berjumlah 2 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 10 dan skor terendah 2, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

10. Meningkatnya penerapan *cyber extension* (aplikasi internet) dalam kegiatan penyuluhan.

Meningkatnya penerapan *cyber extension* (aplikasi internet) diukur dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan berjumlah 11 pertanyaan dan dari setiap pertanyaan diberi kisaran skor 1 – 5, dengan demikian akan diperoleh skor tertinggi 55 dan skor terendah 11, selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan dalam rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 4. Variabel, definisi operasional, indikator pengukuran dan skor/ukuran kinerja penyuluh.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Ukuran
Kinerja penyuluh	Kinerja penyuluh adalah proses dan hasil dari pelaksanaan tugas dalam satu waktu periode tertentu, sebagai perwujudan dari interaksi antara kompetensi, motivasi dan kesempatan yang memberikan kemungkinan seseorang untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, yang berdasarkan pada Sembilan indikator kinerja penyuluh menurut Departemen Pertanian dan satu indikator program BP3K Model CoE dari FP Unila	<p>Pernyataan yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat BPP/Kecamatan yang sesuai dengan kebutuhan petani.</p> <p>Pernyataan yang terkait dengan tersusunnya RKT penyuluh pertanian di wilayah kerja masing-masing.</p> <p>Pernyataan yang terkait dengan tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan spesifik lokasi.</p> <p>Pernyataan yang terkait dengan terdeseminasinya informasi dan teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani.</p> <p>Pernyataan yang terkait dengan tumbuh</p>	Tingkat kinerja penyuluh di BP3K Menggala sebagai BP3K Model CoE diklasifikasikan menjadi rendah, sedang dan tinggi

Tabel 4. *Lanjutan*

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Ukuran
		<p>kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, usaha/asosiasi petani dan usaha formal (koperasi dan kelembagaan lainnya).</p>	
		<p>Pernyataan yang terkait dengan upaya membantu petani/kelompok tani menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pengusaha.</p>	
		<p>Pernyataan yang terkait dengan terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi, terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan pertanian dan pemasaran.</p>	
		<p>Pernyataan yang terkait dengan meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi unggulan di masing-masing wilayah kerja.</p>	
		<p>Pernyataan yang terkait dengan meningkatnya pendapatan petani di masing-masing wilayah kerja.</p>	
		<p>Pernyataan yang terkait dengan meningkatnya penerapan <i>cyber extension</i> (aplikasi internet) dalam kegiatan penyuluhan.</p>	

Kinerja penyuluh adalah nilai perbandingan antara kinerja penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan beban tugas yang seharusnya dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Penentuan tingkat kinerja penyuluh mengacu pada indikator program BP3K Model CoE di Fakultas Pertanian Universitas Lampung serta tujuan yang ditetapkan oleh BP3K Menggala sebagai BP3K Model *Center of Excellence* (CoE). Pengukuran tercapainya tujuan didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman penyuluh terhadap tujuan dan usaha dalam mewujudkannya, terwujudnya tujuan atau tugas penyuluh, serta kesesuaian antara tujuan yang terwujud dengan harapan. Sebaran keberhasilan kinerja tersebut diklasifikasikan ke dalam sangat berhasil (235,2 – 280), berhasil (190,4 – 235,2), cukup berhasil (145,6 – 190,4), kurang berhasil (100,8 – 145,6) dan tidak berhasil (56 – 100,8).

Klasifikasi data lapangan dirumuskan berdasarkan pada rumus Sturges dalam Dajan, (1986) dengan rumus :

$$Z = \frac{X-Y}{K}$$

Keterangan :

Z = Interval kelas

X = Nilai tertinggi

Y = Nilai terendah

K = Banyaknya kelas atau kategori

3.2 Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BP3K Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*), dengan pertimbangan bahwa BP3K Menggala merupakan salah satu BP3K yang dijadikan sebagai

BP3K Model CoE di Kabupaten Tulang Bawang. BP3K Menggala menangani dan membina 3.715 petani yang tersebar di 8 desa di Kecamatan Menggala. Daerah sampel penelitian ini meliputi 8 desa, yaitu: Desa Astra Ksetra, Desa Bujung Tenuk, Desa Ujung Gunung Ilir, Desa Ujung Gunung, Desa Kagungan Rahayu, Desa Tiuh Tohou, Desa Menggala Tengah dan Desa Menggala Kota. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2013.

Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian BP3K Menggala beserta petani binaanya. Penyuluh pertanian pada BP3K Menggala berjumlah delapan orang (Penyuluh PNS dan Penyuluh THL) yang keseluruhan dijadikan responden, sedangkan petani yang dijadikan responden diambil menggunakan teknik sampling. Jumlah populasi petani di delapan desa tersebut adalah 3.715 petani (Programa BP3K Menggala, 2012). Perhitungan sampel petani mengacu pada teori Yamane (1967 dalam Rahmat, 2002), yaitu:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

$$\begin{aligned} n &= \frac{3715}{3715 (0,1)^2 + 1} \\ &= \frac{3715}{3715 (0,01) + 1} \\ &= \frac{3715}{38,15} \\ &= 97 \text{ orang} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan jumlah sampel yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 97 orang yang meliputi delapan desa di Kecamatan Menggala. Pengambilan sampel di masing-masing desa ditentukan dengan menggunakan metode *proportional random sampling*, yang mengacu pada rumus Nasir (1988), yaitu:

$$n_i = \left[\frac{N_i}{N} \right] n$$

Keterangan:

n_i = jumlah sampel setiap desa

N_i = jumlah populasi masing-masing desa

N = jumlah seluruh populasi petani

n = jumlah sampel secara keseluruhan

Tabel 5. Jumlah petani responden

No	Desa	Petani (Jiwa)	Jumlah Sampel
1	Astra Ksetra	120	3
2	Bujung Tenuk	579	15
3	Ujung Gunung Ilir	304	8
4	Ujung Gunung	1440	38
5	Kagungan Rahayu	363	10
6	Tiuh Tohou	324	8
7	Menggala Tengah	200	5
8	Menggala Kota	385	10
	Jumlah	3715	97

Responden dalam penelitian ini selain petani adalah penyuluh yang menangani dan membina usahatani di wilayah BP3K Menggala berjumlah delapan orang (Penyuluh PNS dan Penyuluh THL) yang keseluruhan dijadikan responden. Penentuan responden penyuluh dilakukan dengan sengaja sehingga diperoleh sampel 8 orang penyuluh dari BP3K Menggala. Sebaran sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah sampel penelitian (Petani dan Penyuluh)

No	Desa	Petani (Orang)	Penyuluh (Orang)
1	Astra Ksetra	3	1
2	Bujung Tenuk	15	1
3	Ujung Gunung Ilir	8	1
4	Ujung Gunung	38	1
5	Kagungan Rahayu	10	1
6	Tiuh Tohou	8	1
7	Menggala Tengah	5	1
8	Menggala Kota	10	1
	Jumlah	97	8

3.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survai, yaitu penelitian yang mengambil sampel menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dengan petani dan penyuluh (responden) dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, instansi, dinas, dan lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kinerja penyuluh pertanian.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan statistik non parametrik korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 1997) dengan menggunakan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^3 - n}$$

Keterangan:

r_s = Koefisien korelasi

d_i = Perbedaan pasangan setiap peringkat

n = Jumlah sampel

Rumus r_s ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini akan melihat korelasi (keeratn hubungan) antara *variabel-variabel* dari peringkat dan dibagi dalam klasifikasi tertentu. Hal ini sesuai dengan fungsi r_s yang merupakan ukuran asosiasi dua *variabel* yang berhubungan, diukur sekurang-kurangnya dengan skala ordinal (berurutan), sehingga objek atau individu yang dipelajari dapat diberi peringkat dalam rangkaian berurutan. Bila terdapat *rank* kembar dalam *variabel* X dan Y maka diperlukan faktor koreksi T (Siegel, 1997) dengan rumus:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

$$\sum T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan:

n = Jumlah responden

t = Banyak observasi yang berangka sama pada suatu peringkat tertentu.

T = Faktor koreksi

x^2 = Jumlah kuadrat *variabel independen* yang dikoreksi

y^2 = Jumlah kuadrat *variabel dependen* yang dikoreksi

T_x = Jumlah faktor koreksi *variabel independen*

T_y = Jumlah faktor koreksi *variabel dependen*

Selanjutnya dilakukan uji t, penggunaan uji t dilakukan karena jumlah sampel yang digunakan lebih dari sepuluh responden, dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = rs \sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$$

Keterangan:

t_{hitung} = Nilai t yang dihitung
 n = Jumlah sampel penelitian

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}(n-2)$ pada $\alpha = 0,01$ atau $\alpha = 0,05$, maka terima H_0

Berarti tidak terdapat hubungan nyata antara kedua *variabel* yang diuji.

2. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}(n-2)$ pada $\alpha = 0,01$ atau $\alpha = 0,05$ maka tolak H_0

Berarti terdapat hubungan yang nyata antara kedua *variabel* yang diuji.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Penelitian mengenai Kinerja Penyuluh BP3K Menggala sebagai Model *Center of Excellence* (CoE) ini dilaksanakan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Propinsi Lampung dengan luas wilayah 346.632 ha. Pada awalnya Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara dan secara administratif memiliki batasan wilayah dengan beberapa daerah yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki jumlah penduduk sebesar 402.226 jiwa berdasarkan hasil estimasi penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik, sebagian besar jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang adalah para penduduk pendatang karena Kabupaten Tulang Bawang

merupakan salah satu daerah tujuan pelaksanaan program transmigrasi bagi penduduk di daerah Pulau Jawa. Mayoritas penduduk di Kabupaten Tulang Bawang adalah Suku Jawa dan terdapat berbagai macam suku yang menempati beberapa wilayah seperti : Suku Lampung, Palembang, Bugis dan Bali.

Pada Tahun 2009 Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat, maka wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi 13 Kecamatan dan 112 Kampung/kelurahan setelah dikurangi wilayah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Salah satu kecamatan yang ada di Tulang Bawang adalah Kecamatan Menggala yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini. Menggala merupakan sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tulang Bawang. Pemukiman berada di tepi sungai sebelah selatan dan timur. Kecamatan Menggala memiliki luas wilayah 22.965 Ha. Secara administratif Kecamatan Menggala memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjar Baru/Menggala Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lampung Tengah dan Kecamatan Gedung Meneng.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedong Aji.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

4.2. Kondisi, Topografi, Tanah dan Iklim

Wilayah Kecamatan Menggala dilihat dari topografinya berada pada ketinggian 26 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 28°C, serta memiliki permukaan tanah datar sampai bergelombang sebesar 90%. Kecamatan Menggala memiliki jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) yang terdiri dari asosiasi Podzolik Coklat Kekuningan dan Podzolik Coklat. Tanah tersebut bersifat masam dan unsur hara rendah terutama kandungan Ca, N, P, dan K. Dataran rendah/cekungan berjenis tanah Aluvial Hidromorf yang berasal dari endapan aliran sungai dengan warna tanah kelabu. Berdasarkan iklim, Kecamatan Menggala memiliki tipe iklim C dan D dengan bulan basah 5 – 6 bulan dan bulan kering 2 – 3 bulan. Temperatur udara berkisar 24,2°C dengan kelembaban 99,5%, dan curah hujan 0,2 mm/tahun dengan hari hujan 116 hari dalam setahun.

4.3. Keadaan Penduduk

Kecamatan Menggala memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.021 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 23.763 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 22.258 jiwa. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Menggala lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita. Keadaan penduduk berdasarkan golongan secara rinci disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Keadaan Penduduk Berdasarkan Golongan.

Golongan Umur (Tahun)	Kecamatan Menggala	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 – 14	11.478	24,94
15 - 65	27.104	58,89
65 keatas	7.439	16,17
Jumlah	46.021	100,00

Sumber: Monografi Kecamatan Menggala 2014

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar umur penduduk di Kecamatan Menggala berada pada umur antara 15-65 tahun sebanyak 58,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Menggala rata-rata penduduk masuk dalam usia produktif . Menurut Rusli (1983) usia produktif berada pada kisaran 15 - 64 tahun. Jumlah penduduk dengan usia produktif yang cukup besar ini mampu menyediakan tenaga kerja untuk kegiatan pertanian.

4.4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang pembangunan suatu daerah yang memiliki potensi tinggi menjadi daerah produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kecamatan Menggala memiliki sarana dan prasarana mulai dari sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana umum. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Menggala dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Menggala tahun 2014

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas	3
2	Posyandu	27
3	Poliklinik	14
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7
5	Taman Kanak-kanak (TK)	17
6	Sekolah Dasar (SD)	24
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8
9	Masjid	37
10	Mushola	46
11	Gereja	8
12	Pura	5
13	Sarana Olahraga	19
14	Sarana kesenian/kebudayaan	5
15	Balai pertemuan	9

Sumber: Monografi Desa Kebun Dalam 2014

Tabel 8 menunjukkan bahwa Kecamatan Menggala memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Kecamatan menggala juga memiliki saran sosial ibadah yang terdiri dari masjid, mushola, gereja dan pura.

4.5. Gambaran Umum BP3K Menggala

Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Menggala membawahi (4 kelurahan dan 5 kampung) yang meliputi seluruh wilayah di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

4.5.1. Kelembagaan Penyuluh

BP3K Kecamatan Menggala memiliki delapan orang Penyuluh baik penyuluh PNS maupun Penyuluh THL yang tersebar di delapan wilayah binaannya. Kelembagaan penyuluh yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Menggala dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Nama Penyuluh di BP3K Menggala

No	Nama	WKBPP	Keterangan
1	Harjono	Kepala BP3K	PNS Golongan IIIId
2	Edy Supratman	PPUP Peternakan dan Perikanan PPL Kagungan Rahayu	PNS Golongan IVa
3	Sumardi	PPUP Perkebunan dan Kehutanan PPL Bujung Tenuk	PNS Golongan IVa
4	Heryus Setiawan	PPL Ujung Gunung Iilir, Astra Ksetra, dan Menggala Tengah	THL TBPP
5	Nanang Suyoko	PPL Ujung Gunung	THL TBPP
6	Sopia Depita	PPL Menggala Kota	THL TBPP
7	Siti Nurjanah	PPL Tiuh Tohou	THL TBPP
8	Elida	POPT BP3K	PNS

Sumber :Programa Penyuluhan BP3K Menggala , 2012

4.5.2. Kelembagaan Petani

Perkembangan sektor pertanian harus didukung oleh sarana kelembagaan petani sehingga sektor pertanian mampu bersaing dengan sektor lain. Jumlah kelompok tani yang terdapat di wilayah binaan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Menggala dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah kelompok tani wilayah binaan BP3K Menggala

No	Kampung/ Kelurahan	Kelas Kelompok Tani (*)				Jumlah	Jumlah Anggota Kelompok Tani (**)
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama		
1	Astra Ksetra	5	-	-	-	5	94
2	Bujung Tenuk	4	3	-	-	7	138
3	Ujung Gunung Ilir	2	4	-	-	6	206
4	Ujung Gunung	7	-	-	-	7	89
5	Kagungan Rahayu	5	-	-	-	5	209
6	Tiuh Tohou	4	-	-	-	4	114
7	Menggala Tengah	6	-	-	-	6	203
8	Menggala Kota	6	-	-	-	6	82
Jumlah		44	7	-	-	51	1.135

Sumber : (*) Programa Penyuluhan BP3K Menggala, 2012

(**) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masing-masing kelurahan, 2013

Tabel 10 menunjukkan bahwa kelompok tani di BP3K menggala masih berada di kelas pemula dan lanjut, belum ada kelompok tani yang berada pada kelas madya maupun utama. Sebagian besar kelompok tani di BP3K Menggala berada pada kelas pemula dengan jumlah 44 kelompok tani atau 86,27% dari jumlah kelompok tani yang terdapat di BP3K menggala, sedangkan untuk kelas lanjut hanya terdapat 7 kelompok tani atau 13,73% dari jumlah kelompok tani yang terdapat di BP3K Menggala. Jumlah petani yang menjadi anggota kelompok tani di wilayah BP3K menggala sebesar 1.135 orang sehingga tidak keseluruhan petani yang ada di kecamatan menggala bergabung menjadi anggota kelompok tani.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh di BP3K Menggala sebagai BP3K Model *Center of Excellence* (CoE), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja penyuluh BP3K Menggala termasuk kedalam klasifikasi rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka kinerja penyuluh di BP3K Menggala masih perlu ditingkatkan sesuai dengan peranannya sebagai BP3K Model CoE.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh BP3K

Menggala sebagai BP3K Model CoE adalah umur penyuluh, pendidikan formal, pendapatan rumah tangga penyuluh, lama bertugas sebagai penyuluh dan jumlah petani binaan. Faktor-faktor yang tidak berhubungan nyata dengan kinerja penyuluh adalah pendapatan penyuluh, jarak tempat tinggal penyuluh dengan tempat bertugas, fasilitas kerja, peningkatan kualitas SDM dan insentif yang diterima.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja penyuluh BP3K Menggala sebagai BP3K Model CoE di Kecamatan Menggala

Kabupaten Tulang Bawang, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk menunjang kegiatan penyuluhan perlu adanya dukungan operasional berupa sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai. Perlunya dukungan program yang mengacu kepada peningkatan produktivitas pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani diikuti dengan terwujudnya kemandirian petani. . Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat meningkatkan kinerja penyuluh perlu diperhatikan mengenai umur penyuluh, pendidikan formal penyuluh, pendapatan rumah tangga penyuluh, lama bertugas sebagai penyuluh, jarak tempat tinggal penyuluh dengan tempat bertugas dan jumlah petani binaan.
2. Bagi penyuluh, hendaknya lebih aktif melakukan kunjungan, tatap muka dengan petani, mengembangkan serta menerapkan inovasi-inovasi baru, sehingga penyuluh dapat menjadi media dalam peningkatan kesejahteraan petani dan kinerja penyuluh dapat meningkat. Pelatihan dan penerapan penyebaran informasi melalui media internet juga perlu dilaksanakan dengan baik sejalan dengan penguasaan internet oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. dan N. Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ardiansyah, A., Sumaryo Gs dan Helvi Y. 2014. Persepsi Terhadap Kinerja Penyuluh di BP3K sebagai Model CoE (*Center of Excellence*) Kecamatan Metro Barat Kota Metro. *JIIA, Vol.2, No.2, April 2014*.
- Atriyani, H. 2006. Efektivitas Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK) Pada Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) di Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Bandar Lampung. FP Universitas Lampung.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. *Indonesia dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2011. *Tulang Bawang dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. Menggala.
- Bahermansyah. 1990. Efektifitas Kelompok Tani dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian di WKKP Palas Rawa Sragi Lampung Selatan. *Tesis*. Bandar Lampung. FP Universitas Lampung.
- Bakorluh. 2012. *Daftar BP3K Model CoE Provinsi Lampung*. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Lampung.
- Dajan, A. 1975. *Pengantar Metode Statistik*. LP3S. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2008. *Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hernanto, F. 1991. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Joeseff, S. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Kartasapoetra, A.G. 1988. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lesmana, D. 2007. "Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda". *EPP*, Vol.4, No.2, 2007:24-31.
- Marliati, Sumardjo, Pang S.Asngari. 2008. Faktor-faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Penyuluhan*, Vol.4, No.2, September 2008.
- Murniati, K., Aviati, Y. 2005. *Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Padi Sawah Di Lampung Selatan*. Jurnal Sosio Ekonomika. Fakultas pertanian, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ningsih, EA. 2006. Hubungan Antara Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dengan Kemampuan Kelompok Tani : (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Dan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi*. . Bandar Lampung. FP. Universitas Lampung.
- Nurjanah. 2012. Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Produktivitas Usahatani Padi di Kabupaten Tanggamus (Kasus di Wilayah BP3K Model dan Non Model). *Skripsi*. Bandar Lampung. Unila.
- Oktaria, D. 2008. Efektivitas Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam Menstabilkan Harga Gabah di Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Bandar Lampung. FP Universitas Lampung.
- Peraturan Menteri Pertanian. 2009. *Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sarasmita, E. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kinerja Penyuluh di BP3K Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah sebagai BP3K Model Center of Excellence (CoE). *Skripsi*. Bandar Lampung. FP Universitas Lampung
- Sarwono, J. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Sastraatmadja, E. 1986. *Penyuluh Pertanian: Falsafah, Masalah, dan Strategi*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Sastrohadiwiryo, B.S. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara. Bandung.

- Siegel, S. 1997. *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Gramedia. Jakarta.
- Silalahi, L. 2005. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Pokok Penyuluhan Pertanian Di Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Simamora, H. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Simanungkalit, YV. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sebagai BP3K Model *Center of Excellence*. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Soekartawi. 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Stoner dan Freeman. 1994. *Manajemen*. Intermedia. Jakarta.
- Sudharsono. 1994. *Pengantar Ekonomi Mikro*. LP3ES : Jakarta
- Suhardiyono, L. 1992. *Penyuluhan : Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*. Erlangga. Jakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2003. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media Yogyakarta.
- Sumaryo, Listiana I., dan Gultom DT. 2012. *Dasar-Dasar Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Syaid, E. 2011. *Efektivitas Kemitraan Peternak Sapi dengan PT. GGLC di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. *Skripsi*. FP Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Thoriq. M. 2008. *Kinerja Penyuluh Pertanian Lapang dan Hubungannya dengan Tingkat Kemajuan Usahatani Jeruk di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang*. *Skripsi*. FP Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Van Den Ban, A.W. & Hawkins, H.S. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Winardi, WA. 2015. Efektivitas Model *Center of Excellence* (CoE) terhadap Tingkat Kinerja Penyuluh di BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Bandar Lampung. FP Unila.

Wiriaatmadja, S. 1986. *Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian*. CV Yasaguna.
Jakarta.